

PEMIKIRAN ABU NASR MUHAMMAD AL-FARABI TENTANG NILAI-NILAI PENDIDIKAN KEPEMIMPINAN NEGARA UTAMA

Ahmad Rijal Khoirudin

Islamic Teacher Training College Indonesia
Tegalasri, Karanggebang, Jetis, Ponorogo, Indonesia
E-Mail: rijal.khoirudinahmad@gmail.com

Abstract: *There are two essential components in state management those are the absolute existence of leaders and its society. The quality of leaders in a state is based on the quality of its society education. Due the process of education that takes place on the scope of society becomes a decisive factor both the poor and good leaders who lead a state. This leadership discourse became the main point to be a subject in theme of Indonesian educational society in this era. Acts of corruption, collusion, nepotism of leadership oligarchy and public apathy can be referred to the condition and quality of leadership education in that society. One of the most prominent Islamic figures in state politics studies is Abū Naṣr Muḥammad bin Muḥammad al-Fārābī. Al-Fārābī is a political philosopher and Islamic scholar who has formulated the concept of the perfect state and its leadership concept known as al-Madīnah al-Fāḍilah. According to al-Fārābī a leader is required to provide the education service to his community and lead them to achieve mutual happiness. The problem formulation of this research is how al-Fārābī's idea about the concept of leadership of the perfect state and its application in Islamic education. The goal of al-Fārābī's leadership education is divided into two kinds, those are to form a leader's character and equip the society with theoretical discourse of leadership. The purpose of this study is to examine al-Fārābī's idea about the concept of leadership of the perfect state, then apply the values of leadership education in Islamic religious education, in this case on Islamic education subject in MTs (Islamic Junior High School) and MA (Islamic Senior High School). The values of al-Fārābī's educational leadership are summarized into three, faith to Allah only (tauhīd), cooperation (ta'āwun) and noble character (al-akhlāk al-karīmah). This research based on literature that gain qualitative method. It used a philosophical and political approach, to examine al-Fārābī's thought in philosophical and political state. Documentation method was used to collect the information by analyzing the content of obtained information. The results proved that in general the material of Islamic religion in the level of MTs and MA only contains the values or principles of monotheism, noble character or morality and alias. From the analysis it can be understood that the Islamic religious lesson printed is not perfect or comprehensive, because the discussion does not includes on various aspects, especially in terms of leadership, which is a big problem in Indonesia today. The solution of the problem is to add the values of al-Farabi's leadership education to lesson in the books of Islamic religious education. The concept of al-Farabi's leadership is a form of integration between the principles of faith to Allah only and philosophy. This means philosophically, the concept of leadership can be applied to the subject matter of Islamic religion. So that learners will get additional scientific treasures about leadership, which later expected to be able to become leaders of quality and can contribute in solving leadership problems and society in Indonesia.*

Keywords: *education; leadership; al-madīnah al-fāḍilah.*

Abstrak: *Dalam kepemimpinan suatu negara terdapat dua komponen penting yang mutlak keberadaannya yaitu pemimpin dan masyarakat yang dipimpin. Kualitas pemimpin negara dipengaruhi oleh kualitas pendidikan masyarakat tersebut. Sehingga proses pendidikan yang berlangsung pada lingkup masyarakat menjadi faktor penentu baik buruknya pemimpin yang*

memimpin suatu negara. Wacana kepemimpinan ini menjadi poin utama untuk dijadikan subjek dalam tema pendidikan masyarakat Indonesia era ini. Tindak korupsi, kolusi, nepotisme oligarki kepemimpinan dan sikap apatis masyarakat dapat dirujuk atau berawal dari kondisi dan kualitas pendidikan kepemimpinan dalam masyarakat itu. Salah satu tokoh Islam yang konsen dalam hal politik kenegaraan adalah Abū Naṣr Muḥammad bin Muḥammad al-Fārābī. Al-Fārābī merupakan seorang filosof politik dan ulama Islam yang telah merumuskan konsep negara yang ideal beserta kepemimpinannya yang dikenal dengan al-Madīnah al-Fāḍilah. Menurut al-Fārābī seorang pemimpin dituntut bisa memberikan pendidikan kepada masyarakatnya dan membawa mereka meraih kebahagiaan bersama. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana konsep kepemimpinan negara utama al-Fārābī dan aplikasinya dalam pendidikan agama Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji pemikiran al-Fārābī tentang konsep kepemimpinan negara utama, kemudian mengaplikasikan nilai-nilai pendidikan kepemimpinannya dalam materi pelajaran pendidikan agama Islam jenjang MTs dan MA. Nilai-nilai pendidikan kepemimpinan al-Fārābī terangkum menjadi tiga, yaitu keimanan (tauḥīd), kerjasama (ta'āwun) dan akhlak mulia (al-akhlāk al-karīmah). Penelitian ini bersifat kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis dan politik, untuk mengkaji pemikiran filsafat dan politik kenegaraan al-Fārābī. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dengan menganalisis isi (content analysis) dari data-data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum materi-materi pelajaran agama Islam pada jenjang MTs dan MA hanya memuat nilai-nilai atau prinsip-prinsip tauhid, sifat-sifat atau akhlak mulia dan ketaladanan. Dari analisis tersebut dapat dipahami bahwa materi pelajaran agama Islam yang tercetak dalam buku pelajaran kurang sempurna atau komperhensif, karena pembahasannya tidak menyinggung berbagai macam aspek, khususnya dalam hal kepemimpinan, yang menjadi masalah besar di Indonesia saat ini. Solusi dari masalah tersebut adalah dengan menambahkan pada setiap materi pelajaran dengan nilai-nilai pendidikan kepemimpinan al-Farabi. Konsep kepemimpinan al-Farabi ini merupakan bentuk integrasi antara prinsip-prinsip tauhid dan filsafat. Artinya secara filosofis konsep kepemimpinannya dapat diaplikasikan ke dalam materi pelajaran agama Islam. Sehingga peserta didik akan mendapatkan khazanah keilmuan tambahan mengenai kepemimpinan, yang nantinya diharapkan mampu untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang berkualitas serta dapat berkontribusi dalam menyelesaikan masalah kepemimpinan dan tatanan masyarakat di Indonesia.

Kata kunci: pendidikan; kepemimpinan; al-madīnah al-fāḍilah.

PENDAHULUAN

Negara terhimpun dari beberapa komunitas atau individu yang mempunyai latar belakang, kebutuhan dan ideologi yang beragam, sehingga diperlukan suatu sistem kepemimpinan politik untuk mengatur hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan individu dalam kehidupan bermasyarakat dan membawa mereka kepada tujuan yang diinginkan bersama.¹ Awal lahirnya pemimpin yaitu

dari lingkungan masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa pemimpin adalah cerminan dari masyarakat. Artinya masyarakat yang menjadi faktor penentu baik buruknya pemimpin yang memimpin mereka.² Dengan membentuk kualitas kehidupan yang baik dalam masyarakat, sama pentingnya dengan membentuk

al-Qurā, 2008), hlm. 28-30.

2 Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Abī Bakr Ayyūb Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Miftāḥ Dār as-Sa'ādah wa al-Mansyūr Walāyah al-'Ilmi wa al-Irādah*, jilid I, ditahqiq oleh 'Abd ar-Raḥmān bin Ḥasan bin Qāid, (Makkah: Dār 'Ālim al-Fawāid, 1432 H), hlm. 721-722.

1 Jāsīm Muḥammad Sulṭān, *Qawā'id fi al-Mumārisah as-Siyāsiyah*, cet. I, (t.tp: Muassasah Ummu

kualitas calon pemimpin yang akan memimpin masyarakat itu.

Salah satu sarana untuk membentuk masyarakat yang ideal adalah dengan mengajarkan pendidikan.³ Pendidikan dan kepemimpinan memiliki hubungan yang sangat erat. Bahkan dapat dikatakan metode yang tepat untuk membentuk seorang pemimpin yang berkualitas dan berkarakter adalah dengan pendidikan. Wacana kepemimpinan menjadi poin utama untuk dijadikan subjek dalam tema pendidikan masyarakat era ini. Fakta menunjukkan bahwa pada saat ini banyak terjadi penurunan politis kepemimpinan pada kalangan elit pemerintahan.

Maraknya tindak korupsi, kolusi, nepotisme, *money pilitic*, oligarki kepemimpinan dan berbagai kasus lainnya bukan menjadi hal yang baru lagi terjadi pada para pejabat negara. Dari fenomena tersebut merangsang timbulnya sikap apatis masyarakat terhadap konsep demokrasi yang dijalankan oleh negara. Terbukti pada setiap pemilihan umum, partisipasi masyarakat cenderung menurun. Ironisnya lagi, dunia politik sering kali dianggap dan dipahami oleh masyarakat sebagai dunia kotor yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan dan perlu dihindari.⁴

Penurunan politis kepemimpinan di Indonesia saat ini dapat dirujuk penyebabnya dari problem dalam masyarakat yang berawal dari bagaimana kondisi dan kualitas pendidikan dalam masyarakat itu sendiri, khususnya pendidikan tentang kepemimpinan. Artinya pendidikan tentang kepemimpinan ini menjadi hal yang wajib dipelajari bagi keseluruhan masyarakat. Dengan kata lain seluruh masyarakat harus mengenyam atau mengetahui pendidikan

kepemimpinan sebagai bekal wacana tentang kepemimpinan dalam diri mereka masing-masing.

Tujuan dari pendidikan kepemimpinan ini tidak hanya untuk membentuk seseorang pemimpin yang berkualitas dan berkarakter, akan tetapi juga membekali masyarakat dengan wacana teoritis kepemimpinan, sehingga mereka teredukasi dan bisa menjadi agen pengawas jalannya kepemimpinan.

Salah satu tokoh Islam yang fokus dalam hal ini adalah Abū Naṣr Muḥammad bin Muḥammad al-Fārābī. Al-Fārābī merupakan seorang filosof politik Islam yang berhasil menyatukan antara ilmu-ilmu filsafat dengan nilai-nilai Islam.⁵ Salah satu karyanya yang terkenal dalam hal kepemimpinan politik adalah *Ārā' Ahl al-Madīnah al-Fāḍilah*. Karya tulis tersebut telah banyak memberikan kontribusi keilmuan terhadap khazanah filsafat politik Islam tentang kepemimpinan dan politik kenegaraan, yang disebut dengan istilah negara utama (*al-Madīnah al-Fāḍilah*).

Konsep kepemimpinan al-Fārābī dalam karyanya tersebut sangat dipengaruhi oleh doktrin-doktrin ketuhanan (*at-tauḥīd*) serta dikemas dengan nuansa keislaman yang kental, sehingga dapat disimpulkan pemimpin yang diinginkan al-Fārābī adalah pemimpin yang mempunyai basis keislaman yang kuat.⁶ Menurut al-Fārābī, negara utama menyerupai organ tubuh manusia yang saling membantu dalam memenuhi kebutuhan tubuh. Sedangkan, seorang pemimpin diibaratkan seperti jantung manusia.⁷

Pemimpin negara idealnya adalah

3 Omar Mohammad at-Toumy asy-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam*, cet. I, terj. Hasan Langgulung, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 408.
4 Choirul Mahfud, *Politik Pendidikan Islam, Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Orde Baru*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 6.

5 Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Abī Bakr Ayyūb Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Miftāḥ Dār as-Sa'adah wa al-Mansyūr Walāyah al-'Ilmi wa al-Īrādah*,... hlm. 1157.
6 Mūsā Abdullāh, *Al-Madīnah wa al-Akhlāq fī Khiṭāb al-Fārābī*, cet. I, (Beirut-Lebanon: Dār ar-Rawāfid, 2014), hlm. 95.
7 Abū Naṣr Muḥammad bin Muḥammad al-Fārābī, *Ārā' Ahl al-Madīnah al-Fāḍilah wa Muḍādātuhā li Abī Naṣr al-Fārābī*, ditaḥqīq oleh 'Alī Bū Mullḥam, cet. I, (Beirut-Lebanon: Dār wa Maktabah al-Hilāl, 1995), hlm. 114.

harus dapat mencerdaskan kehidupan masyarakatnya untuk mencapai kebahagiaan bersama, maka idealnya seorang pemimpin negara adalah seorang nabi yang memiliki kesempurnaan sifat, akhlak dan akal serta dapat berhubungan dengan akal aktif. Dengan konsep ini, al-Fārābī mempersyaratkan tingginya moral sang pemimpin.

Pemikiran al-Fārābī tentang kepemimpinan negara utama menjadi jawaban dari persoalan kepemimpinan di negara Indonesia. Dimana seorang pemimpin dituntut bisa membawa masyarakatnya menuju kepada kebahagiaan bersama dan mampu untuk memberikan pendidikan kepada masyarakatnya, agar terjalin kesinambungan tugas, yaitu tugas pemimpin dengan kepemimpinannya dan tugas masyarakat sebagai agen yang aktif dalam mengawasajalannya kepemimpinan, sehingga tercipta keharmonisan dalam hubungan masyarakat dalam suatu negara. Maka untuk merealisasikan hal tersebut, diperlukan peran pendidikan sebagai dasar pembentukan karakter dan kualitas seorang

pemimpin serta sebagai pengetahuan dan wacana untuk masyarakat selaku partisipan dalam sistem politik negara.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemikiran al-Fārābī tentang konsep kepemimpinan negara utama serta untuk menerapkan pemikiran Abū Naṣr Muḥammad al-Fārābī tentang konsep kepemimpinan negara utama dalam pendidikan agama Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan pemikiran Abū Naṣr Muḥammad al-Fārābī tentang konsep kepemimpinan negara utama serta mengaplikasikan nilai-nilai pendidikan kepemimpinan negara utama al-Fārābī dalam materi pelajaran pendidikan agama Islam pada jenjang Mts dan MA.

Berdasarkan hasil penelusuran dari berbagai pustaka dan karya ilmiah terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang secara tidak langsung bersangkutan atau bersangkutan dengan penelitian yang dibahas di atas, terdiri dari tesis, 2 buku, 8 jurnal.

No.	Nama	Karya Ilmiah	Judul
1.	Fuad Muhammad Zein	Tesis	<i>Abū Naṣr Muḥammad al-Fārābī and St. Thomas Aquinas Concepts of Political Power</i>
2.	Ahmad Zainal Abidin	Buku	<i>Negara utama (Madinatul Fadīlah)</i>
3.	Yamani	Buku	<i>Filsafat Politik Islam: Antara al-Fārābī dan Khomeini</i>
4.	Acma Toquero Macarimbang	Jurnal (internasional)	<i>Envisioning a Perfect City: an Introduction to al-Farabi's Political Philosophy</i>
5.	Dr. Halā 'Alī dan 'Alī al-Khaṭīb	Jurnal (internasional)	<i>Binyah as-Sulṭah wa Ususuhā al-epistumūlūjiyah fi Falsafah al-Fārābī as-Siyāsah</i>
6.	arār 'Alī Banī Yāsīn	Jurnal (internasional)	<i>Falsafah al-Fārābī as-Siyāsīyah Dirāsah fi 'Alāqah al-Faiḍ bi al-'Ilm al-Madani</i>
7.	Salmah	Jurnal	<i>Aktualisasi Filsafat al-Fārābī Dalam Era Modern (Telaah Kritis Teori Kenegaraan al-Madīnah al-Fadīlah)</i>
8.	M. Wiyono	Jurnal	<i>Pemikiran Filsafat al-Fārābī</i>
9.	Ahmad Zaenal Abidin	Jurnal	<i>Konsep Ketatanegaraan Islam Menurut al-Fārābī dan Ayatullah Khumaeni</i>

No.	Nama	Karya Ilmiah	Judul
10.	Mahmuda	Jurnal	<i>Konsep Negara Ideal/ Utama (Maḍīnah al-Faḍīlah) Menurut al-Fārābī</i>
11.	Moh. Asy'ari Muthhar	Jurnal	<i>Kontekstualisasi Filsafat Politik al-Fārābī Dalam Pemikiran Politik Modern</i>

Berdasarkan beberapa pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dibahas saat ini sudah pernah dibahas atau diteliti oleh peneliti lain. Akan tetapi yang membedakan penelitian ini dengan beberapa pustaka tersebut adalah analisis mengenai konsep kepemimpinan negara utama al-Fārābī, yang kemudian diekstraksikan ke dalam bentuk nilai-nilai pendidikan kepemimpinan. Kemudian dilanjutkan dengan menerapkan nilai-nilai pendidikan kepemimpinan negara utama al-Fārābī tersebut dalam usaha pembentukan mental, karakter dan akhlak peserta didik yang nantinya akan menjadi calon pemimpin dan hidup dalam tatanan masyarakat negara, melalui materi pelajaran pendidikan agama Islam pada jenjang menengah (MTs dan MA).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang sumber data-datanya diperoleh dari kajian literatur melalui dokumen-dokumen yang memuat informasi berkaitan dengan masalah penelitian, serta menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk meneliti objek secara alamiah dan memperoleh data yang mendalam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis dan politik, untuk mengkaji pemikiran filsafat dan politik kenegaraan al-Fārābī. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dengan menganalisis isi (*content analysis*) dari data-data yang diperoleh. Data-data yang didapatkan bersumber dari karya-karya pribadi tokoh, dalam hal ini al-Fārābī, serta dari data-data tertulis berupa tulisan-tulisan, baik dalam

bentuk buku, artikel, maupun jurnal yang yang mempunyai keterikatan dan dapat menunjang perolehan data dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Al-Fārābī menjadikan pendidikan sebagai dasar utama dalam merumuskan konsep kepemimpinan negara utama. Al-Fārābī mengartikan pendidikan dengan istilah pengajaran (*at-ta'lim*) dan pembentukan karakter (*at-ta'dib*).⁸ Proses pendidikan menurut pandangan al-Fārābī lebih merupakan suatu rangkaian aktivitas yang mencoba membentuk masyarakat intelek, berakhlak dan agamis. Masyarakat yang diinginkan oleh al-Fārābī bukanlah kumpulan manusia sembarangan. Namun sekumpulan manusia yang menguasai berbagai macam kebajikan, keutamaan serta ilmu pengetahuan, khususnya ilmu ketuhanan dan terorganisasi secara baik serta saling bekerjasama dalam meraih kebahagiaan.⁹

Konsep Kepemimpinan negara utama yang dicetuskan oleh al-Fārābī ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Plato. Selain itu, al-Fārābī juga menganalisis dan banyak mencontoh bentuk kepemimpinan Muhammad sebagai seorang Nabi dan *khalīfah* ketika memimpin kota Madinah. Hal ini terbukti dengan adanya Piagam Madinah (*Misāq al-Madīnah*). Piagam Madinah ini tersusun dari empat prinsip besar dan merupakan

8 Abū Naṣr Muḥammad bin Muḥammad al-Fārābī, *Taḥṣīl as-Sa'ādah li Abī Naṣr al-Fārābī*, ditahqiq oleh 'Alī Bū Muḥam, cet. I, (Beirut-Lebanon: Dār wa Maktabah al-Hilāl, 1995), hlm. 71-73.

9 Abū Naṣr Muḥammad bin Muḥammad al-Fārābī, *Ārā' Ahl al-Madīnah al-Faḍīlah wa Muḍādātuhā li Abī Naṣr al-Fārābī*,...hlm. 142-143.

konstitusi pertama di dunia. Secara garis besar, prinsip tersebut menjunjung persamaan hak serta mengangkat jiwa kebersamaan, senasib dan sepenanggungan antar muslim. Dengan adanya kesepakatan ini mampu meredam dan mendamaikan berbagai macam konflik berkaitan dengan perbedaan suku, ras dan agama, serta dapat menciptakan sebuah bentuk peradaban sosial yang utuh.¹⁰

Peristiwa besar tersebut dijadikan al-Fārābī sebagai refleksi pemikiran kenegaraannya. Untuk mewujudkan kebahagiaan bersama, masyarakat negara hendaknya dapat menguasai segala keutamaan, baik ilmu pengetahuan dan akhlak atas dasar tauhid, serta berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan sosial mereka. Sebuah tatanan kehidupan masyarakat tersebut hanya dapat tercapai dengan adanya sebuah konsep kepemimpinan yang ideal, layaknya seorang Nabi.¹¹

Al-Fārābī berpendapat bahwa pemimpin negara merupakan pengganti Nabi yang mengatur pemerintahan atau negara serta bertanggung jawab mengajarkan akhlak, moral atau budi pekerti yang baik kepada masyarakatnya berlandaskan syariat-syariat atau hukum-hukum Allah demi mencapai kebahagiaan sejati, seperti halnya tugas kepemimpinan yang diemban oleh Nabi Muhammad. Pendapat al-Fārābī ini sejalan dengan pernyataan Ibn Khaldūn yang dikutip oleh Munawir Sjadzali¹² dan pendapat yang dikemukakan oleh al-Māwardī.¹³

Kaitannya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menjadi pemimpin negara, al-Fārābī secara jelas telah merumuskannya menjadi dua bagian, yaitu syarat-syarat pemimpin pertama (*ar-raīs al-awwal*) dan syarat-syarat alternatif untuk pemimpin kedua (*ar-rasīs as-sānī*). Syarat-syarat *ar-raīs al-awwal* terdiri dari dua belas poin, yaitu (1) memiliki anggota badan yang sempurna, (2) pemahaman yang baik, (3) ingatan atau hafalan yang kuat, (4) intelektualitas yang tinggi (5) penyampaian pendapat yang baik, (6) cinta terhadap ilmu pengetahuan, (7) tidak rakus dalam hal makan, minum dan wanita, (8) cinta kejujuran dan orang yang jujur, (9) berjiwa besar, (10) tidak rakus terhadap kekayaan, kenikmatan dan kesenangan dunia, (10) cinta keadilan dan orang yang berbuat adil, (12) memiliki keberanian.¹⁴

Untuk syarat-syarat *ar-rasīs as-sānī* terdiri dari enam poin, yaitu (1) arif atau bijaksana, (2) memahami syariat-syariat atau undang-undang, (3) memiliki kemampuan dalam mengambil kesimpulan terhadap permasalahan baru, (4) memiliki kemampuan dalam melihat dan mengambil kesimpulan terhadap fenomena yang terjadi sekarang dan nanti, (5) memiliki kemampuan dalam membimbing dan memberi nasehat, (6) memiliki badan yang sehat.¹⁵

Berpijak pada uraian di atas dapat diartikan bahwa pemimpin negara merupakan seseorang yang mencapai tingkatan mendekati Nabi, yang menjaga eksistensi dan mengembangkan agama Islam, serta menjadikannya sebagai sentral hukum, sumber peraturan serta legitimasi yang diaplikasikannya dalam mengatur kehidupan masyarakat negara. Dengan adanya kepemimpinan yang Islami ini

10 Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būfī, *Fiqh as-Sīrah an-Nabawiyah Ma'a Mūjaẓ li Tārīkh al-Khilāfah ar-Rāsyidah*, cet. X, (Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr al-Mu'āṣirah, 1991), hlm. 226-228.

11 Mahmuda, *Konsep Negara Ideal/ Utama (al-Madīnah al-Fāḍilah) Menurut al-Fārābī*, dalam Jurnal Al-Lubb, Vol. 2, No. 1, 2017: 271-291, hlm. 273-274.

12 Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet. I, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990), hlm. 102.

13 Abū al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Māwardī, *Al-Aḥkām as-Sulṭānīyah wa al-*

Walāyāt ad-Dīniyyah, ditahqīq oleh Aḥmad Mubārak al-Bagḍādī, cet. I, (al-Kuwait: Maktabah Dār Ibn Qatībah, 1989), hlm. 3.

14 Abū Naṣr Muḥammad bin Muḥammad al-Fārābī, *Ārā' Ahl al-Madīnah al-Fāḍilah wa Muḍādātuhā li Abī Naṣr al-Fārābī*,...hlm. 122-124.

15 *Ibid.*, hlm. 124-125.

akan mendorong terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat negara yang baik, yang dapat mewakili dan menjadi representasi bentuk pemerintahan negara yang sebenarnya, layaknya kejayaan kota Madinah selama masa kepemimpinan Nabi Muhammad.

Berdasarkan pembahasan konsep kepemimpinan negara utama al-Fārābī di atas, dapat ditarik beberapa nilai pendidikan kepemimpinan yang terkandung di dalamnya. Beberapa nilai pendidikan kepemimpinan tersebut antara lain: keimanan (*at-tauhīd*), kerjasama (*at-ta'āwun*) dan akhlak yang mulia (*al-akhlāq al-karīmah*). *Al-akhlāq al-karīmah* ini merupakan hasil rangkuman prinsip-prinsip dari syarat-syarat *ar-raīs al-awwal* dan *ar-rasīs as-sānī*. *Al-akhlāq al-karīmah* tersebut terbagi menjadi dua, yaitu berkaitan dengan kesempurnaan fisik dan akal dan berkaitan dengan moral atau akhlak.

Nilai-nilai *al-akhlāq al-karīmah* yang berkaitan dengan akal yaitu yaitu anggota badan yang lengkap (*tamām al-a'dā'*), intelektualitas tinggi (*jayyid al-faṭānah*), penyampaian yang baik (*ḥusn al-'ibārah*) dan cinta terhadap ilmu (*ḥubbu al-'ilm*). Sedangkan yang berkaitan dengan moral atau akhlak yaitu kearifan (*al-ḥikmah*), kesucian diri (*al-'iffah*), keberanian (*asy-syajā'ah*), keadilan (*al-'adālah*), kejujuran (*aṣ-ṣidq*) dan zuhud (*az-zuhd*).

Dalam rangka mewujudkan konsep kepemimpinan negara utama beserta masyarakatnya dalam konteks kenegaraan sekarang ini, diperlukan adanya usaha untuk menerapkan nilai-nilai pendidikan kepemimpinan al-Fārābī tersebut agar dapat dipahami dengan mudah. Salah satu cara yang tepat dan strategis untuk menerapkan nilai-nilai tersebut yaitu melalui lembaga pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam merupakan salah satu sarana yang dapat menunjang terwujudnya nilai-nilai atau prinsip prinsip moral dan spiritual. Nilai-nilai tersebut secara keseluruhannya

bermuara pada tauhid dan pembentukan akhlak, perilaku dan karakter peserta didik.

Tujuan akhir dari pendidikan agama Islam melahirkan atau mencetak manusia sempurna (*insān kāmil*). Manusia sempurna (*insān kāmil*) di sini berarti manusia yang mampu melaksanakan tugasnya sebagai seorang hamba yang bertakwa kepada penciptanya, serta sebagai *khalīfah* yang mengatur dan memakmurkan dunia sesuai dengan konsep-konsep yang telah ditentukan Allah melalui Rasul-Nya.

Secara sistem nilai-nilai ini terhimpun dalam sebuah kurikulum pendidikan, dimana proses penerapan dan pembelajarannya tercermin dalam tiap-tiap materi pelajaran agama Islam, yaitu pelajaran Akidah Akhlak, al-Quran Hadis, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Fiqih.¹⁶ Sehingga jika dilihat dari segi materinya, nilai-nilai pendidikan kepemimpinan negara utama al-Fārābī ini dapat diaplikasikan secara utuh ke dalam berbagai macam materi pelajaran agama Islam.

Pada materi pendidikan agama Islam tersebut terdapat dua komponen kompetensi, yaitu kompetensi inti dan dasar, yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kompetensi inti tersebut yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, berperilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (toleransi dan gotong-royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial sesuai dengan jangkauan pergaulan dan keberadaannya.¹⁷ Sedangkan kompetensi dasarnya tercermin pada setiap materi pelajaran yang diajarkan.

16 Fahrudin, Hasan Asari dan Siti Halimah, *Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Dalam Menanamkan Akhlakul Karimah Siswa*, dalam Jurnal Edu Riligia, Vol. 01, No. 04 Oktober-Desember 2017, hlm. 524.

17 Kementerian Agama, *Buku Siswa Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah Kelas IX*, cet. I, (Jakarta: Kementerian Agama, 2016), hlm. 1.

Nilai-nilai pendidikan kepemimpinan negara utama al-Fārābī dalam penelitian ini, akan diaplikasikan pada materi mata pelajaran pendidikan agama Islam. Mata

pelajaran tersebut meliputi Akidah Akhlak, al-Quran Hadis, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Fiqih pada jenjang pendidikan Mts dan MA.

Materi Pelajaran Akidah Akhlak

No.	Kelas	Judul/ Materi	Aplikasi Nilai-Nilai Pendidikan Kepemimpinan al-Fārābī
1.	Kelas 7	Akidah Islam	Pemimpin yang bertauhid (tauhid sebagai dasar aturan negara)
2.	Kelas 7	Keteladanan Nabi Sulaiman	Pemimpin amanah (selalu merasa diawasi oleh Allah). Membuka ruang bagi masyarakatnya untuk berdialog dengan penyampaian bahasa yang baik
3.	Kelas 8	Iman Kepada Rasulullah	Pemimpin harus memiliki sifat <i>ṣidiq, amanah, tabligh, faṭonah</i> dan <i>'iffah</i>
4.	Kelas 8	<i>Husnuzan, Tawādu', Tasāmuḥ & Ta'āwun</i>	Modal utama terbentuknya negara yaitu dengan kerjasama (manusia makhluk sosial). Dari kerjasama yang kuat akan lahir sikap <i>husnuzan, tawādu', tasāmuḥ</i>
5.	Kelas 8	Keteguhan Iman Abu Bakar aṣ-Ṣiddīq	Pemimpin negara memiliki kualitas iman yang tinggi, sifat <i>al-'iffah</i> dan <i>az-zuhud</i> terhadap kenikmatan dunia
6.	Kelas 9	Keteladanan 'Umar bin Khaṭṭab	Pemimpin harus memiliki rasa <i>khauf</i> yang tinggi kepada Allah. Artinya memiliki sifat <i>al-'iffah</i> dan <i>az-zuhd</i>
7.	Kelas 10	Menghindari Sifat Licik, Tamak, Dzalim & Diskriminasi	Empat sifat tersebut berlawanan dengan sifat <i>aṣ-ṣidq, az-zuhd, al-'iffah</i> dan <i>al-'adl</i> yang harus dimiliki pemimpin
8.	Kelas 10	Memahami Induk Akhlak Terpuji	Kombinasi empat akhlak tersebut akan menjadikan pemimpin yang berkualitas mendekati Nabi
9.	Kelas 11	Meneladani Kisah Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar al-Ghifari	Pemimpin harus memiliki kualitas ibadah dan keimanan yang kuat, serta mengedepankan sikap zuhud terhadap segala kenikmatan dan kemewahan

Materi Pelajaran al-Qur'an Hadis

No.	Kelas	Judul/ Materi	Aplikasi Nilai-Nilai Pendidikan Kepemimpinan al-Fārābī
1.	Kelas 7	Kusandarkan Aktivitasku Hanya Kepada Allah	Segala tindakan dan keputusan pemimpin didasarkan pada nilai-nilai <i>keilahiyahan</i> . Konsep tauhid ini, akan menjadikan pribadi seorang pemimpin yang loyal dan amanah

No.	Kelas	Judul/ Materi	Aplikasi Nilai-Nilai Pendidikan Kepemimpinan al-Fārābī
2.	Kelas 8	Ku Gapai Rezeki-Mu Dengan Ikhtiarku	Kinerja pemimpin harus optimal sebagai bentuk tanggung jawab dan rasa syukurnya kepada Allah. Pemimpin harus mampu menjaga dirinya (<i>al-'iffah</i>) dari hal-hal yang diharamkan.
3.	Kelas 8	Kuraih Ketenangan Dengan Tidak Tamak Harta	Pemimpin harus memiliki sikap <i>al-'iffah</i> dan <i>az-zuhd</i> agar terhindar dari segala macam tindakan yang merugikan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.
4.	Kelas 9	Manusia Sebagai Hamba Allah dan Khalifah di Bumi	Dua tujuan penciptaan manusia, yaitu menjadi pemimpin yang taat dan memiliki sifat sesuai dengan sifat-sifat Allah dalam mengatur dunia. Manusia juga seorang hamba yang diberi beban untuk beribadah kepada-Nya
5.	Kelas 12	Hidup Tenram Karena Jujur dan Adil	Sikap jujur pemimpin menumbuhkan rasa percaya masyarakat kepadanya. Sikap adil pada pemimpin artinya mampu menentukan keputusan pada tempatnya, bukan berpihak kepada keputusan yang hanya menguntungkan diri sendiri.

Materi Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)

No.	Kelas	Judul/ Materi	Aplikasi Nilai-Nilai Pendidikan Kepemimpinan al-Fārābī
1.	Kelas 7	Pola Dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah	Pemimpin yang ideal adalah seseorang filosof atau ulama, yang mendekati derajat Nabi. Dia mampu merubah tatanan masyarakat yang kurang ideal menjadi masyarakat yang ideal
2.	Kelas 8	Kepemimpinan 'Umar bin 'Abdul 'Azīz	Kepemimpinan 'Umar bin 'Abdul 'Azīz tersebut didasarkan atas prinsip, sifat dan akhlak Rasulullah sebagai <i>ar-raīs al-awwal</i> . Sehingga prinsip tersebut hendaknya diterapkan juga oleh para pemimpin politik atau pemerintahan
3.	Kelas 8	Khalifah-Khalifah Besar Dinasti 'Abbāsiyah	Kecerdasan yang tinggi dan cinta ilmu menjadi syarat dasar bagi pemimpin. Dengan kecerdasan dan ilmu yang luas akan mempermudah pemimpin untuk merumuskan program pemerintahan, serta akan menjadikan pendidikan sebagai tolak ukur kemajuan negara.

Materi Pelajaran Fiqih

No.	Kelas	Judul/ Materi	Aplikasi Nilai-Nilai Pendidikan Kepemimpinan al-Fārābī
1.	Kelas 12	<i>Khilāfah</i> (Pemerintahan Dalam Islam)	Untuk menciptakan tatanan masyarakat negara yang ideal harus didasarkan pada prinsip-prinsip Islam (tauhid, kedaulatan rakyat, keadilan, kejujuran, keikhlasan, tanggung jawab). Pemimpi juga harus memiliki kepribadian atau akhlak mulia dalam mengemban tugas kepemimpinan

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum, pembahasan materi-materi pelajaran agama Islam jenjang Mts dan MA terdapat atau hanya memuat nilai-nilai atau prinsip-prinsip tauhid, sifat-sifat atau akhlak mulia dan ketaladanan, seperti pada pembahasan materi akidah Islam, induk-induk akhlak terpuji, ketaladanan sifat-sifat Nabi dan para sahabat serta konsep pemerintahan Islam (*khilāfah*). Dari analisis tersebut dapat dipahami bahwa materi-materi pelajaran agama Islam yang tercetak dalam buku pelajaran Mts dan MA kurang komprehensif. Dengan kata lain pembahasannya tidak menyinggung berbagai macam aspek kegiatan atau aktivitas kehidupan dalam bermasyarakat, khususnya dalam hal kepemimpinan, yang menjadi masalah besar di Indonesia pada akhir-akhir ini. Hal ini dapat dilihat dari dangkalnya pembahasan isi atau kandungan dari materi-materi tersebut, sedangkan ini merupakan materi pelajaran Mts dan MA. Artinya jika dilihat dari segi umur, peserta didik pada taraf ini telah mampu berpikir secara lebih mendalam dibandingkan dengan peserta didik dibawahnya. Salah satu hal yang dapat menjadi solusi dari masalah tersebut adalah diperlukannya sesuatu produk penyempurna materi-materi yang tercetak dalam buku pelajaran. Penyempurna di sini artinya bukan

mengganti dari isi materi, akan tetapi melengkapi materi buku pelajaran itu secara teks. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyisipkan atau menambahkan pada setiap materi yang diajarkan dengan ajaran-ajaran kepemimpinan, dalam hal ini menggunakan perpektif kepemimpinan al-Farabi.

Al-Farabi merupakan filosof Islam yang memiliki konsep politik murni sebagai founder filosof negara. Konsep al-Fārābī tentang kepemimpinan negara utama merupakan bentuk pemikiran atau interpretasi yang sangat komprehensif mengenai pemahamannya tentang akidah dan filsafat. Pemikirannya tersebut kental akan prinsip-prinsip tauhid yang diterjemahkan dalam bentuk aplikasi akhlak, kepemimpinan dan politik kenegaraan. Artinya secara filosofis konsep kepemimpinannya dapat diaplikasikan ke dalam berbagai macam materi pelajaran agama Islam. Sehingga dengan pemahaman terhadap konsep kepemimpinan al-Farabi ini, akan menjadikan bahan atau khazanah keilmuan tambahan bagi peserta didik, yang nantinya diharapkan mereka mampu untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang berkarakter, berakhlak mulia dan meneladani sifat-sifat Nabi serta dapat berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai macam masalah kepemimpinan dan tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullāh, Mūsā. 2014. *Al-Madīnah wa al-Akhlāq fī Khiṭāb al-Fārābī*. cet. I. Beirut-Lebanon: Dār ar-Rawāfid.
- Abī Bakr Ayyūb Ibn Qayyim al-Jauziyah, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin. 1432 H. *Miftāh Dār as-Sa'ādah wa al-Mansyūr Walāyah al-'Ilmi wa al-Irādah*. jilid I. ditahqīq oleh 'Abd ar-Raḥmān bin Ḥasan bin Qāid. Makkah: Dār 'Ālim al-Fawāid.
- Agama, Kementerian. 2016. *Buku Siswa Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah Kelas IX*. cet. I. Jakarta: Kementerian Agama.
- At-Toumy asy-Syaibany, Omar Mohammad. 1979. *Falsafah Pendidikan Islam*. cet. I. terj. Hasan Langgulung. Jakarta: Bulan Bintang.
- Fahrudin, Hasan Asari dan Siti Halimah. 2017. Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Dalam Menanamkan Akhlakul Karimah Siswa, dalam

- Jurnal Edu Riligia*, Vol. 01, No. 04: 516-531.
- Ḥabīb al-Māwardī, Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin. 1989. *Al-Aḥkām as-Sultānīyah wa al-Walāyāt ad-Dīniyyah*. ditahqīq oleh Aḥmad Mubārak al-Bagdādī. cet. I. al-Kuwait: Maktabah Dār Ibn Qatībah.
- Mahfud, Choirul. 2016. *Politik Pendidikan Islam, Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Orde Baru*. cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahmuda. 2017. Konsep Negara Ideal/ Utama (al-Madīnah al-Fāḍilah) Menurut al-Fārābī, dalam *Jurnal Al-Lubb*, Vol. 02, No. 01: 271-291.
- Muḥammad al-Fārābī, Abū Naṣr Muḥammad bin. 1995. *Ārā’ Ahl al-Madīnah al-Fāḍilah wa Muḍādātuhā li Abī Naṣr al-Fārābī*. ditahqīq oleh ‘Alī Bū Mulḥam. cet. I. Beirut-Lebanon: Dār wa Maktabah al-Hilāl.
- _____. 1995. *Tahṣīl as-Sa’ādah li Abī Naṣr al-Fārābī*. ditahqīq oleh ‘Alī Bū Mulḥam. cet. I. Beirut-Lebanon: Dār wa Maktabah al-Hilāl.
- Ramaḍān al-Būṭī, Muḥammad Sa’īd. 1991. *Fiqh as-Sīrah an-Nabawīyah Ma’a Mūjaż li Tārīkh al-Khilāfah ar-Rāsyidah*. cet. X. Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr al-Mu’āṣirah.
- Sjadzali, Munawir. 1990. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. cet. I. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sultān, Jāsim Muḥammad. 2008. *Qawā’id fī al-Mumārīсах as-Siyāsīyah*, cet. I, t.tp: Muassasah Ummu al-Qurā.